

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi dibalik itu semua kedua sumber daya alam tersebut tidak menjamin adanya pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu tercemin dari tingginya tingkat kemiskinan dan juga permasalahan pengangguran, yang disebabkan masih minimnya tingkat kesempatan kerja di berbagai daerah. Permasalahan pengangguran tersebut muncul dikarenakan terdapat ketimpangan antara tingginya jumlah angkatan kerja dan masih minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sudah sepantasnya menjadi tugas dari berbagai sektor yang ada untuk menyerap para angkatan kerja tersebut. Salah satu sektor perekonomian selama ini yang dinilai paling berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian adalah sektor industri. Dimana, sektor industri berperan dalam memberikan sumbangan terhadap PDB, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan juga berperan dalam menghasilkan barang dan jasa untuk di ekspor.

Menurut Arsyad (2010: 442), sektor industri mempunyai peran sebagai sektor pemimpin (Leading sektor). Dikarenakan dengan adanya pembangunan sektor industri maka akan sanggup mendorong pembangunan di sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan sektor jasa, sehingga nantinya akan berpengaruh pada meluasnya lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan dan permintaan

masyarakat (daya beli). Peningkatan terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat menggambarkan bahwa perekonomian tumbuh dengan baik. Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang dikembangkan di Indonesia sebagai faktor penggerak kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peran sektor industri dalam perekonomian dinilai penting terutama dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Secara struktural, perekonomian Jawa Timur dikuasi oleh 4 sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Meski cukup dominan, sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang relatif kecil sehingga pangsa cenderung menurun. Kenyataan ini tidak terlalu mengherankan mengingat elastisitas barang primer (termasuk pertanian) yang relatif kecil, serta perkembangan teknologi yang mengakibatkan cakupan sektor pertanian beralih menjadi sektor agroindustri, seperti pada kasus penggilingan padi. Tetapi walaupun sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang relatif kecil, sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor tertinggi pada saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor tertinggi dalam menyerap tenaga kerja. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu berdasarkan jenis kelamin dan lapangan pekerjaan tahun 2020 (Jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,196,328	2723139	6919467
Industri Pengolahan	3,331,965	1376528	4708493
Perdagangan besar dan eceran	4,749,215	4585792	9335007
Jumlah/Total	12,277,508	8,685,459	20,962,967

Sumber : BPS Jawa Timur 2021

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahawa dari segi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 sektor industri pengolahan memiliki jumlah terendah dari 3 sektor utama di Jawa Timur, yaitu sebesar 4.708.493 jiwa. Padahal dalam kenyataannya sektor industri memiliki potensi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur karena memiliki keterkaitan dan ketertarikan dengan sektor sektor yang lain. Pengembangan sektoral di Jawa Timur lebih efektif diorientasikan pada sektor industri pengolahan. Sebab, sektor industri pengolahan merupakan penggerak utama perekonomian wilayah, mengingat potensinya yang cukup besar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan (pengangguran), persediaan permintaan domestik, serta ketertarikan yang tinggi antara sektor industri dengan sektor lainnya baik secara backward maupun forward. Hal ini sudah dibuktikan dengan tingginya distribusi PDRB yang dihasilkan oleh industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur.

Dalam 2 tahun terakhir terjadi suatu fenomena tersebarnya virus corona (covid-19) yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Merebaknya virus

corona (covid-19) telah menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Hingga saat ini, dengan adanya pandemi covid-19 melemahkan perekonomian dunia menyebabkan kebijakan pembangunan berubah haluan. Begitu pula dengan kebijakan perencanaan tenaga kerja (**Sulistiawati, 2020**). Secara tidak langsung, perusahaan harus mengurangi jumlah pekerjanya agar dapat mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain untuk mencegah penyebaran virus covid-19, perusahaan mengambil langkah tersebut juga bertujuan untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh covid-19. Menurut pemeriksaan ILO (International Labor Organization) karena tindakan isolasi total atau sebagian, saat ini mempengaruhi hampir 2,7 miliar pekerja. Para pekerja ini sudah mencapai 81%. Pada situasi saat ini, perusahaan di berbagai sektor ekonomi memnghadapi krisis ekonomi terutama di perusahaan kecil. Jutaan pekerja dapat dengan mudah kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka dan menghadapi PHK (**Syahrial 2020**).

Dikutip dari **liputan6.com**, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan adanya penurunan serapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di masa pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto menyebutkan bahwa, hingga Agustus 2020, penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan hanya mencapai 17,48 juta atau sekitar 13,61 persen dari total tenaga kerja nasional. Hal ini dapat memberi gambaran bawa dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Beberapa diantaranya adalah tingkat upah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Upah merupakan faktor yang penting bagi pekerja, karena bagaimanapun juga upah bagi pekerja merupakan tempat bergantung bagi kelangsungan hidup pekerja beserta keluarganya. Adapun yang dimaksud dengan upah menurut **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut **Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HL.01.00/X/2019** tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019, **kenaikan 8,51 persen itu berlaku untuk seluruh provinsi RI**. Dalam surat edaran itu juga disebutkan, angka 8,51 persen didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Berikut adalah tabel kenaikan UMP dari seluruh Provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.2 : Tingkat Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Pada Tahun 2019-2020

Nama Provinsi	Tingkat Upah Minimum Provinsi (Rupiah)	
	2019	2020

Jawa Timur	1.630.059	1.768.777
Jawa Tengah	1.605.396	1.742.015
Jawa Barat	1.742.015	1.810.350
Yogyakarta	1.570.922	1.704.607
DKI Jakarta	3.940.973	4.276.349
Banten	2.267.965	2.460.968

Sumber : Gajimu.com

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat upah tertinggi terdapat pada provinsi DKI Jakarta dengan jumlah tingkat upah di tahun 2019 adalah sejumlah 3.940.973 rupiah dan ditahun 2020 sejumlah 4.276.349. Sedangkan tingkat upah terendah terdapat pada provinsi Yogyakarta dengan jumlah tingkat upah di tahun 2019 adalah sejumlah 1.570.922 rupiah dan ditahun 2020 sejumlah 1.704.607 rupiah. Kenaikan upah yang meningkat setiap tahunnya tersebut terjadi karena biaya hidup layak meningkat akibat harga - harga kebutuhan ekonomi yang selalu meningkat. Pemerintah berusaha meningkatkan upah minimum dan menyeimbangkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

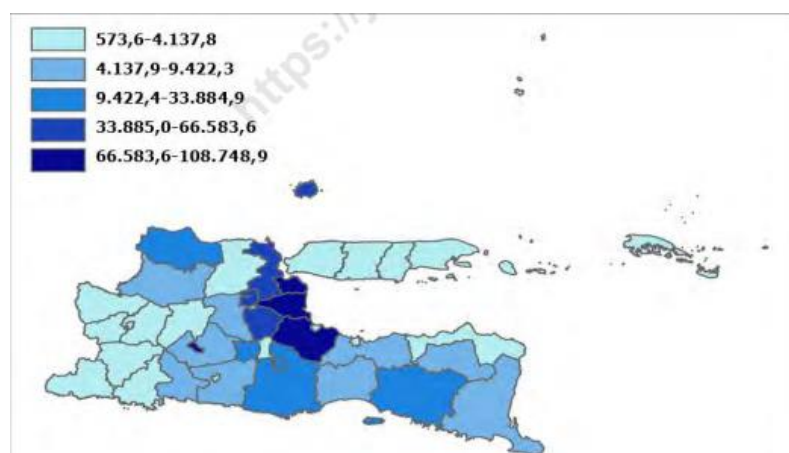
Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi tenaga kerja adalah investasi. Menurut **Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2020**, bahwa penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 mencapai 1.156.361 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 11,85% persen dari pencapaian tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.033.835 tenaga kerja. Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi/Kepala BKPM, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut berasal dari total investasi yang sebesar Rp 826,3 triliun pada tahun 2020. Penyerapan tenaga kerja paling banyak terjadi pada kuartal I-2020, yaitu sebanyak 330.539 orang. Pada kuartal II-2020 penyerapan tenaga kerja adalah sebanyak 263.109 orang. Kemudian, pada kuartal III-2020 sebanyak 295.387 orang, dan sebanyak 294.780 orang pada kuartal IV 2020. Situasi pandemi tidak menjadi

penghalang bagi pemerintah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. BKPM mencatat terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi pada kuartal II-2021. Penyerapan tenaga kerja dari investasi meningkat sebesar 18.5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tercatat penyerapan 311.922 orang tenaga kerja pada kuartal II-2021 dari 263.109 orang tenaga kerja pada kuartal II-2020. Penyerapan tenaga kerja berasal dari dua sumber, yaitu PMDN dan PMA. PMDN menyerap sebesar 165.684 orang tenaga kerja, sementara PMA menyerap 146.238 orang tenaga kerja. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada kuartal II-2021 didampingi peningkatan realisasi investasi pada periode yang sama. Dalam laporan Kementerian Investasi/BKPM, tercatat realisasi investasi Indonesia meningkat sebesar 1,5 persen dari kuartal sebelumnya. Tepatnya, pemerintah Indonesia berhasil mengantongi Rp 233 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan 16,2 persen dari hasil yang didapatkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi investasi sepanjang April-Juni 2021 yang bersumber dari PMDN adalah sebanyak Rp 106,2 triliun, sedangkan investasi dari PMA adalah sebanyak Rp 116,8 triliun. Peningkatan ini tentu diiringi oleh strategi yang mumpuni. Bahlil Lahadalia mengungkapkan tiga strategi yang digunakan untuk membantu penyerapan tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Pertama, BKPM meminta investor untuk mengalihkan pekerjaan yang dilakukan oleh mesin ke tenaga manusia. Kedua, investasi didorong tidak hanya di sektor teknologi, namun juga padat karya. Terakhir, fokus tidak hanya diarahkan pada perusahaan besar yang lebih banyak menggunakan teknologi, tetapi pada investor kecil yang membuka banyak lapangan pekerjaan. Kontribusi investasi terbesar pada tahun lalu masih berasal

dari investor lokal, yaitu sebesar 50,1 persen. Investor asing hanya menyumbang 49,9 persen dari total investasi. Lebih rincinya pada tahun 2020, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 413,5 triliun, sementara investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 412,8 triliun. Angka ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 7 persen pada jumlah investasi lokal dan penurunan 2,4 persen pada investasi asing.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja secara teoritis diantaranya ditunjukkan oleh hukum okun, terdapat relasi negatif antara pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini okun menyatakan jika terjadi penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen, maka akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan PDB mendekati 2 persen. Dengan kata lain, hukum okun menyatakan apabila PDB meningkat sebesar 2 persen, maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar 1 persen (Mankiw 2012). Hal ini disebabkan penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Okun mengungkapkan makin tinggi pengangguran, maka makin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Blanchard, 2011).

Gambar 1.1 Sebaran Kabupaten/Kota menurut PDRB industri pengolahan Jawa timur tahun 2020 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Privinsi Jawa Timur 2020

Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang sangat dominan di Jawa Timur. Pada tahun 2020, nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp705,80 triliun atau 30,69 persen.

Menurut **Astuti (2014)** sektor industri pengolahan dapat mendorong sektor jasa dan pertanian, dilihat dari lapangan usaha yang dominan di Jawa Timur adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, dan pertanian;perhutanan;perikanan. Seperti ditunjukkan PDRB provinsi Jawa Timur pada tabel berikut.

Tabel 1.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha 2014-2017

LAPANGAN USAHA	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	28,95	29,31	28,91	29,12
Perdagangan Besar dan Eceran	17,34	17,6	17,9	17,94
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,56	13,65	13,49	12,84

Sumber : BPS Jawa Timur 2018

Jika dilihat dari tabel 1.3 diatas, sektor industri pengolahan yang memberi sumbangan terbesar atas PDRB Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 29,12%,

kemudian disusul perdagangan besar dan eceran sebesar 17,93%, sedangkan pertanian;kehutanan;perikanan sebesar 12,84%

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “**Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Timur?
2. Apakah tingkat investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Timur?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Timur?
4. Manakah dari keempat variabel yang mempengaruhi paling dominan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tingkat upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Jawa Timur
4. Untuk mengetahui manakah dari keempat variabel yang mempengaruhi paling dominan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat umum, sebagai alat untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta bahan studi komparatif penelitian lain yang berkaitan dengan topik serupa
2. Bagi Universitas, dapat menambah acuan akademis dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam membahas ataupun memecahkan masalah yang sama
3. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan langkah awal penerapan dan pengalaman dari ilmu pengetahuan serta sebagai pengalaman yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang